

Pelimpahan Wewenang Dan Pelayanan Pemerintahan Kabupaten Ke Pemerintah Nagari¹

Oleh : Tengku Rika Valentina², Bakaruddin Rosyidi³, Asrinaldi⁴

Abstract

This article wish to explain how storey effectivity of decentralization authority and service of Nagari Koto Baru Governance and Nagari Gantung Ciri Governance is relevance with some variable of human resource, finance, and participate the society. And also see the type and sum up and categorize the authority, which have been executed by Nagari Koto Baru Government and Nagari Gantung Ciri Government. This research try to lay open any kind of authority which have been executed by Nagari Koto Baru Government and Nagari Gantung Ciri Government and also how storey of effectivity decentralization of the service and authority if seen from three variable, human resource, finance and participate the society. This research is used a concept analyzes the type of authority and effectivity decentralization of public service and authority.

Pendahuluan

Wacana tentang otonomi daerah yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik di kalangan akademisi maupun dari kalangan praktisi merupakan wacana yang menarik untuk diteliti. Keputusan politik pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu keputusan yang paling radikal dibandingkan dengan keputusan-keputusan politik lain. Implikasi dari keputusan itu jelas akan berdampak sangat luas, bukan saja bagi daerah-daerah tetapi juga bagi pemerintahan pusat sendiri.

Besaran perubahan yang dikehendaki dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintah daerah yang terjadi, model efisiensi struktural yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan mulai menganut model demokrasi lokal yang menekankan nilai demokrasi dan kemajemukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

¹ Skripsi Sarjan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas dengan Judul "Pelimpahan Wewenang Dan Pelayanan Pemerintahan Kabupaten Ke Pemerintah Nagari (Studi: Pemerintah Nagari Koto Baru Dan Pemerintahan Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok". 2004.

² Alumni Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

³ Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Politik Cabang Padang

⁴ Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

Seiring dari pergeseran model tersebut, terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi. Kemudian dilakukan pula pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser model organisasi hirarkis ke model organisasi yang horizontal. Hubungan antara kabupaten atau kota dan propinsi tidak lagi 'dependent' (bergantung) dan 'sub ordinate' (ada atasan dan bawahan) tetapi 'independent' (tidak bergantung) dan 'coordinate' (ada koordinasi atau sederajat). Penyerahan pemerintah kepada daerah otonom yang semula dianut 'ultra - vires doctrine' (bersifat teoritis dan sangat tidak praktis) dengan memerinci kompetensi daerah otonom diganti dengan 'general competence' (kewenangan yang bersifat umum) yang merinci kompetensi pemerintah dan propinsi, pengawasan pemerintah terhadap daerah otonom yang cenderung kohersif bergeser ke persuasif dengan tujuan supaya prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan⁵

Dalam TAP MPR No IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan pada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparat pemerintah di daerah dalam kewenangan dan keuangan, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah⁶. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-masing daerah menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya dengan mempertimbangkan tahap-tahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana serta sistem manajemen anggaran dan manajemen publik. Sehingga penyelenggaraan otonomi di daerah menjadi salah satu upaya strategis yang berdimensi jauh kedepan.

Walaupun kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam semangat UU No 22 tahun 1999 telah melahirkan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab terutama bagi daerah kabupaten dan kota, tidak berarti bahwa daerah-daerah tersebut akan menjadi terkotak-kotak, terlepas dan bebas dari pengendalian, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, dimana keleluasaan otonomi yang diberikan kepada daerah tetap harus terjamin dan tidak keluar dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Khusus untuk daerah propinsi, otonomi yang dilimpahkan bersifat terbatas, tapi tetap mempunyai peran sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah. Tugas ini dilaksanakan oleh propinsi sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.⁸ Walaupun pembinaan dan pengawasan dilakukan propinsi kepada kabupaten dan kota, propinsi tetap berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang dilakukan pemerintah pusat pada daerah yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Setelah dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999, Perda Propinsi Sumatera Barat No 9 tahun 2000 dan Perda Kabupaten Solok No 4 tahun 2001 ada suatu agenda otonomi yang

⁵ "Otonomi daerah di Masa Depan" (Jakarta : Media Indonesia , 10 September 2001) p. 47

⁶ Tap MPR No IV / MPR/ 2000 (Jakarta: Pabelan 2003) p. 37.

⁷ Forum Inovasi Capacity Building dan Good Governance. Vol 3 Juni-Agustus. (Jakarta : PPs PSIA FISIP UI, 2002) hal. 56

⁸ Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan otonomi Daerah di Sumatera Barat. (Padang : Balitbang dan SCIDev UNAND, 2002) hal. 1-2.

harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang kemudian harus disosialisasikan pada masyarakat yaitu menyusun dan menjalankan sebuah struktur organisasi pemerintahan baru dan inventarisasi hubungan kerja dan kewenangan yang ditujukan pada organisasi dan pemerintahan yang paling depan yaitu pemerintah nagari karena pemerintah nagari dipandang sebagai kekuatan pembangunan yang memiliki nilai-nilai sosial budaya yang ditaati oleh masyarakatnya tanpa banyak diatur oleh pemerintah daerah.

Oleh karena prinsip pelaksanaan otonomi daerah kabupaten berada pada tingkat masyarakat terendah (nagari), maka sudah seharusnya pemerintah menyerahkan kewenangan dan urusan tersebut pada pemerintah nagari dengan memperhatikan kemampuan masing-masing nagari.

Secara umum wewenang yang dilimpahkan tersebut antara lain meliputi pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kewenangan yang diserahkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari dapat dikelompokkan kedalam beberapa bidang kewenangan:

1. Bidang kehutanan
2. Bidang perindustrian
3. Bidang koperasi
4. Bidang pariwisata
5. Bidang pertambangan dan lingkungan hidup
6. Bidang pekerjaan umum
7. Bidang pertanahan
8. Bidang perhubungan
9. Bidang kependudukan
10. Bidang tenaga kerja
11. Bidang pendidikan
12. Bidang kesehatan
13. Bidang pertanian
14. Bidang sosial
15. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
16. Bidang penerangan informasi dan komunikasi
17. Bidang perkebunan
18. Bidang perencanaan
19. Bidang hukum dan perundang-undangan

Salah satu ukuran efektifitas adalah terkait dengan kemampuan masing-masing nagari dalam mengelola sumberdaya manusianya, kemampuan dalam bidang keuangan, kemampuan dalam bidang peralatan serta kemampuan dalam bidang organisasi atau manajemen.

Disamping itu efektifitas pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten kepada pemerintah nagari juga sangat tergantung pada partisipasi dan pelayanan publik dalam melaksanakan urusan-urusan yang telah dilimpahkan tersebut. Karena partisipasi masyarakat dan pelayanan publik tidak hanya merupakan sarana legitimasi program

tetapi juga menjadi salah satu indikator untuk menilai efektifitas pelimpahan wewenang tersebut.

Penelitian tentang studi efektifitas pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten kepemerintah nagari ini pernah dilakukan oleh Pusat Studi Otonomi Daerah (PSOTODA) Universitas Andalas yang bekerjasama dengan Balitbangda Propinsi Sumatera Barat (2003) Tentang studi efektifitas pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari di Sumatera Barat.

Satu hal yang ingin saya jelaskan bahwa penelitian ini memang mengacu pada penelitian PSOTODA dengan Balitbangda Propinsi Sumatera Barat tahun 2003 namun fokus penelitian ini lebih terkonsentrasi pada dua nagari yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu nagari Gantung Ciri dan Nagari Koto Baru, tetapi kelebihannya disini responden penelitiannya lebih diperdalam yaitu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dikedua nagari. Pada penelitian Ps Otoda dengan Balitbangda Propinsi Sumatera Barat yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah 5 kabupaten yang telah mengeluarkan SK Bupati tentang pelimpahan kewenangan, dengan pemilihan nagari yang didasarkan pada pertimbangan letak geografis, artinya nagari yang berada disekitar zona kabupaten yang mewakili wilayah timur, barat, utara dan selatan, yang diukur dari pusat kota kabupen. Dengan pemilihan responden yaitu perwakilan masyarakat yang duduk sebagai aparat dalam pemerintahan nagari. Seperti Wali nagari, Ketua BPN, Ketua MTTs, KAN, Pemuda dan bundo kanduang.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tentang studi efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten kepemerintah nagari dengan memperdalam dan memfokuskan serta memperbandingkan dua nagari yang dijadikan sebagai sampel penelitian belum dilakukan selama ini.

Permasalahan

1. Jenis Kewenangan apa saja yang telah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Koto Baru dan Pemerintah Nagari Gantung Ciri.
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Nagari Koto Baru dan Pemerintahan Nagari Gantung Ciri jika dilihat dari sumber daya manusia, keuangan, dan partisipasi masyarakat?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui analisis jenis dan jumlah kewenangan yang telah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah nagari Koto Baru dan Pemerintah Nagari Gantung Ciri.
 - b. Untuk mengetahui kontigensi jenis kewenangan
 - c. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Nagari Koto Baru dan Pemerintahan Nagari Gantung Ciri jika dilihat dari sumber daya manusia, keuangan, dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari.
- b. Secara praktis dapat memberikan pemahaman, masukan, saran dan gambaran pada pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari tentang tingkat efektifitas kewenangan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari, serta melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pelimpahan kewenangan dan pelayanan tersebut.

Kerangka Konsep

Analisis Jenis dan Kategori Kewenangan

Wewenang dapat dirumuskan sebagai hak suatu unit satuan kerja atau seseorang untuk melakukan tindakan atau tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.⁹ Dalam realisasinya hak diatas disalurkan melalui pejabat yang dipercayakan untuk memimpin unit kerja tertentu yang terbatas mengenai bidang kerja masing-masing. Sedangkan pelimpahan mengacu pada pengertian penyerahan atau pemberian.

Dari pengertian diatas maka pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebahagian hak yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat atasan pada bawahan. Konsep analisis kewenangan dimaksudkan untuk melihat apakah jenis kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah nagari bersifat memberi rekomendasi, fasilitasi, pengawasan pembantuan atau pengelolaan sepenuhnya terhadap kewenangan yang dilimpahkan. Konsep analisis kewenangan ini pada gilirannya akan berhubungan langsung dengan analisis jumlah kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten pada pemerintah nagari.

Berdasarkan pandangan ini maka perlu dikembangkan rasionalitas urusan jumlah urusan minimal yang harus dilaksanakan oleh nagari artinya masing-masing nagari dengan kemampuannya yang paling minimal dipandang mampu menyelenggarakan 12 urusan minimal yakni¹⁰

1. Penandatanganan KTP dan KK
2. Penandatanganan surat mutasi penduduk
3. Penerbitan izin keramaian
4. Penerbitan IMB
5. Penerbitan kartu keluarga miskin
6. Pengelolaan pasar nagari
7. Pengelolaan pas ternak
8. Penarikan retribusi galian c

⁹ Hadan Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung 1984) hal 24 dalam Josef Riwa Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal 218.

¹⁰ Di lihat dari Laporan Efektifitas Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Nagari di SumateraBarat.. (Padang : PS OTODA dan Balitbangda Propinsi Sumatera Barat 2003.) hal 10.

9. Penarikan PBB
10. Pengelolaan pariwisata
11. Pengawasan pendidikan
12. Pengawasan pengelolaan SDM

Dengan demikian jika 12 urusan minimal ini telah dilimpahkan sepenuhnya pada pemerintah nagari maka pelimpahan kewenangan tersebut dikatakan efektif dengan kata lain 12 urusan tersebut tidak lagi bersifat rekomendasi atau fasilitasi tetapi sudah menjadi kewenangan pemerintah nagari sepenuhnya.

Efektifitas Pelimpahan Wewenang dan Pelayanan

Merujuk pada Hidayat sebagaimana yang dikutip oleh Mariun bahwa pengertian efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Chester I Bernard seperti yang dikutip oleh Gibson dkk bahwa efektifitas adalah tingkat pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.¹¹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran atau tingkat pencapaian tujuan yang dikehendaki, tujuan tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana wewenang yang diserahkan tersebut dapat mewakili aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat nagari.

Pelimpahan wewenang oleh Mariun diartikan sebagai suatu sistem dimana bagian-bagian dari tugas negara diserahkan penyelenggaraannya pada orang yang sedikit banyak mandiri. Organ yang mandiri disini wajib atau berwenang melakukan tugas-tugasnya atas inisiatif dan menurut kebijaksanaan sendiri.¹²

Dalam konteks peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah nagari pada masyarakat, digunakan sebagai acuan adalah Kepmenpan No 81 tahun 1983, yang antara lain mengatur tentang pemberian pelayanan publik prima. Pelayanan publik prima dalam kepmenpan ini dijabarkan kedalam 8 indikator yaitu kesederhanaan., kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan tepat waktu.¹³

Indikator kesederhanaan dalam pemberian pelayanan ini menyangkut persoalan bagaimana prosedur atau tata cara pengurusan dalam suatu urusan. Kemudahan suatu urusan yang tidak berbelit-belit dan kemudahan dalam memahami prosedur yang harus dijalani. Begitu pula mengenai indikator kejelasan dan kepastian serta keterbukaan ini dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan masyarakat juga dapat mengajukan keluhan apabila dalam penyelesaian urusan tidak sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan. Indikator lain yang dilihat adalah faktor keamanan yang dikaitkan dengan rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat ketika menerima pelayanan. Sementara itu indikator keadilan yang merata dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan pada masyarakat tidak ada perlakuan khusus bagi masyarakat tertentu, semua

¹¹ James I Gibson dkk . *Organisasi dan Manajemen ,Filaku, Struktur dan Proses* terjemahan Djoerhan Wahid (Jakarta: Erlangga, 1984) hal 27 dalam Proposal Penelitian " Studi Efektifitas Pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten ke Pemerintahan nagari , Kerjasama PS OTODA dan Balitbangda Propinsi Sumatera Barat hal 7

¹² Laporan Penelitian Studi Efektifitas... Op. Cit., hal. 7

¹³ Kepmenpan No 81 tahun 1983 dalam Laporan Penelitian... Op.Cit., hal 13.

warga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah nagari. Indikator yang lainnya adalah efisien, ekonomis dan tepat waktu yang tercermin pada terpenuhinya standar waktu yang telah ditetapkan dan kalau dilihat dari tarif atau biaya yang ditetapkan masih relatif terjangkau oleh masyarakat¹⁴

Pelayanan publik dipilih sebagai variabel dependen karena salah satu yang menjadi tujuan dilimpahkan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, segala urusan yang dahulunya diurus oleh pemerintah kabupaten sekarang sudah dapat diserahkan kenagari sehingga bentuk pelayanan tersebut akan menjadi efektif. Yang kemudian pemerintahan nagari dapat mengintegrasikan nagari yang terisolasi melalui monitoring dan evaluasi proyek menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Variabel Penjelas Efektifitas Pelimpahan Wewenang dan Pelayanan.

Dalam penelitian ini digunakan 3-variabel penjelas yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan partisipasi masyarakat. Dipilihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai variabel karena berhasil atau tidaknya pelaksanaan kewenangan sebahagian besar tergantung pada SDM itu sendiri. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan padanya tergantung pada kualitas atau pengalaman yang dimilikinya.

Keuangan dipilih sebagai variabel karena salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan nagari dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan artinya keuangan adalah faktor yang paling esensial dalam mengukur tingkat kemampuan nagari untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Ini berarti dalam penyelenggaraan rumah tangganya, nagari membutuhkan dan atau uang.

Partisipasi masyarakat dipilih sebagai variabel karena keberhasilan pelaksanaan kewenangan juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat baik sebagai kesatuan sistem maupun individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan nagari. Karena secara prinsip pelimpahan kewenangan ditujukan untuk memudahkan urusan masyarakat ditingkat lebih bawah (masyarakat nagari) oleh sebab itu tanggung jawab dari pelimpahan wewenang tersebut tidak hanya sebatas pada pemerintahan nagari dan aparatnya tetapi juga ditangan masyarakat nagari tersebut.

Mengenai ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disini meliputi

- Jumlah personil yang akan melaksanakan urusan
- Kecakapan personil yang terkait dengan urusan yang akan dilaksanakan
- Motivasi dan kreativitas para personil
- Mentalitas personil dalam bekerja.

Yang kesemuanya terkait pada

- perincian tugas dan fungsi masing-masing personil
- satuan-satuan unit organisasi yang akan dipimpin

¹⁴ Ibid., hal 14

Pelimpahan Wewenang dan Pemerintahan Kabupaten Ke Nagari Tengku Rika V

- hubungan kewenangan antara unit vertikal dan unit horizontal
- kecakapan aparat yang melaksanakannya.

2. Keuangan.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, sebuah nagari membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi nagari untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengurus rumah tangganya, tapi juga menjadi ciri pokok dan mendasar dari otonomi nagari akan menjadi hilang.

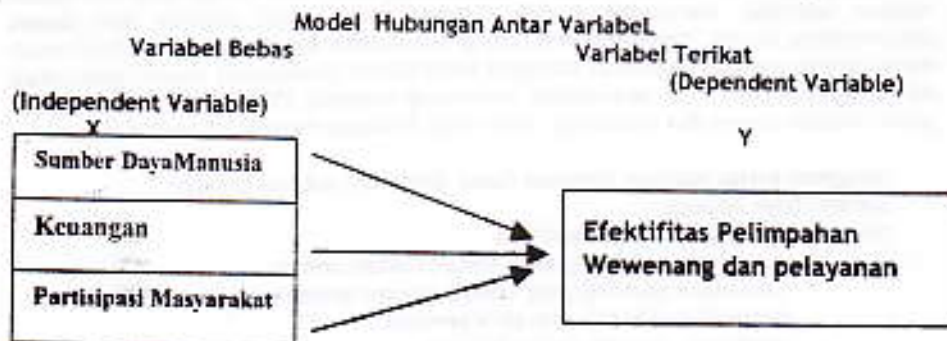
Untuk dapat memiliki keuangan yang lebih memadai dengan sendirinya nagari membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Dalam hal ini nagari dapat memperolehnya melalui :

- Sumber-sumber pendapatan nagari
- Sumber-sumber pinjaman
- Sumber-sumber aset kekayaan yang dimiliki yang kesemuanya dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan.

3. Partisipasi masyarakat

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat akan diukur dari:

- Seberapa jauh pemerintah nagari memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi untuk hal-hal terkait dengan masalah-masalah pembangunan nagari, pelayanan masyarakat maupun tugas-tugas pemerintah pada umumnya.
- Sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah nagari untuk menampung aspirasi masyarakat. Seperti pertemuan warga dengan pemerintah serta lembaga-lembaga nagari, kotak aspirasi, forum komunikasi yang melibatkan Ninik Mamak, Alim Ulama dan perantau, serta Cadiak Pandai di nagari.



Hipotesis

Dengan pemahaman konsep dari variabel penjelas dan diagram hubungan antar variabel diatas maka hipotesis yang diajukan antara lain :

1. SDM merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan tingkat efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari, dimana semakin tinggi kualitas dari SDM maka semakin efektif pelimpahan kewenangan dan pelayanan oleh pemerintah nagari.
2. Keuangan merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan tingkat efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari, dalam bentuk dana alokasi umum untuk nagari (DAUN) dan semakin besar pendapatan nagari atau keuangan nagari maka semakin efektif pelimpahan wewenang tersebut pada pemerintah nagari.
3. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pelimpahan wewenang, karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun nagarinya maka semakin efektif pelimpahan wewenang dan pelayanan tersebut pada pemerintah nagari

Metode Penelitian

Pendekatan dan Tipe Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan pendekatan kuantitatif maka akan diperoleh data- data empirik yang memungkinkan kita untuk melihat kecenderungan umumnya melatar belakangi tingkat efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari, melalui penganalisaan data- data dan angka- angka¹⁵

Penggunaan pendekatan kuantitatif ini akan mempermudah peneliti untuk menganalisa korelasi antara berbagai variabel terukur, yang pada akhirnya akan memudahkan pelaksanaan penelitian ini. Efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari mewajibkan peneliti harus mengukur tingkat efektifitas pelimpahan wewenang tersebut dan proses ini lebih cocok dilakukan dengan metode kuantitatif. Penelitian ini termasuk pada penelitian penjelasan (*explanatory research*) sebab dalam penelitian ini akan dilihat hubungan kausal antara beberapa variabel berdasarkan hipotesis penelitian.¹⁶

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, baik untuk data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari responden, pengumpulan data primer ini dilakukan dengan penggunaan kuesioner. Sedangkan data-data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari pihak lain. data-data ini berupa data demografi, kondisi geografis dan jumlah penduduk dari dua nagari yang diteliti lain yang memberikan informasi terhadap peneliti

¹⁵ Melly G.Tan. " Penggunaan Data Kuantitatif " *Metode Penelitian Masyarakat*. Ed. Koentjaraningrat (Jakarta: 1994) hal 253.

¹⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES 1989) hal 5

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel¹⁷. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Koto Baru dan masyarakat Nagari Gantung Ciri yang tinggal menetap dalam nagari ditambah dengan aparat di dua nagari yaitu Nagari Gantung Ciri dan Nagari Koto Baru

Responden merupakan orang atau individu yang dapat memberikan informasi pada peneliti. Dalam penelitian ini responden yang dipilih adalah individu yang telah berumur 16 tahun keatas, penetapan ini didasarkan bahwa penduduk yang telah berumur 16 tahun keatas telah melakukan urusan dipemerintahan nagari.

Teknik sampling yang digunakan yaitu *Multistage sampling*, artinya proses penarikan sampling dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Dari 5 Kabupaten di Sumatera Barat yang telah mengeluarkan SK Bupati yang mengatur tentang kewenangan, dipilih secara random satu kabupaten yaitu Kabupaten Solok
2. Dari 81 Nagari yang ada di Kabupaten Solok dipilih secara acak dua nagari yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu nagari dengan kriteria sebagai nagari pilot proyek kembali berpemerintahan nagari di kabupaten solok hasil kerjasama dengan GTZ Jerman. Yaitu Nagari Sumani, Alahan Panjang dan Gantung Ciri, dan tiga nagari tersebut dipilih secara acak satu nagari sehingga didapat Nagari Gantung Ciri
Kriteria kedua pemilihan nagari didasarkan pada nagari yang penduduknya cukup heterogen dengan jumlah mata pencarian penduduk yang lebih beragam, maka dipilihlah Nagari Koto Baru. Dan secara kebetulan kedua nagari tersebut berada dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Kubung.
3. Mengingat cukup besarnya populasi penduduk yang berumur diatas 16 tahun keatas di kedua nagari, yaitu nagari koto baru sebesar 11 783 orang dan nagari gantung Ciri sebesar 3199 orang maka ditentukanlah jumlah sampel dari kedua nagari tersebut. Dalam menentukan sampel penelitian ini digunakan rumus Frank Lynck yaitu :¹⁸

$$n = \frac{NZ^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + Z^2 p(1-p)}$$

- Ket:
- | | | |
|---|---|---|
| n | = | Jumlah sampel |
| N | = | Jumlah populasi |
| Z | = | Nilai dari variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95% |
| P | = | Harga patokan tertinggi (0,50) |
| d | = | Sampling error (0,10) |

Maka besarnya sampel pada nagari koto baru dan nagari gantung ciri adalah sebanyak 95 dan 93 orang responden. Untuk memudahkan penelitian jumlah

¹⁷ Drs Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (-, Bumi Akasara,-) hal 53.

¹⁸ Sugiarto dkk. *Teknik Sampling* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal 60.

responden di kedua nagari dikenakan menjadi 100 orang, tujuannya agar memudahkan dalam pengolahan data.

4. Dari masing-masing jorong atau wali kampung dipilih responden secara systematic sampling (sampel sistematis) teknik ini diterapkan karena populasi yang tersebar disetiap jorong atau wali kampung pada kedua nagari mempunyai sebuah kerangka sampel yang didasarkan pada kartu keluarga yang didata berdasarkan no urut rumah.

Untuk distribusi masing-masing sampel didua nagari dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Distribusi sampel pada masing-masing jorong
di Nagari Koto Baru

| No | Jorong | Jumlah populasi | Persentase sampel | Jumlah sampel |
|--------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Subarang | 2931 | 25 | 25 |
| 2 | Lubuk agoeng | 462 | 4 | 4 |
| 3 | Simpang | 1588 | 14 | 14 |
| 4 | Simpang sawah beliak | 2712 | 23 | 23 |
| 5 | Bawah duku | 1393 | 12 | 12 |
| 6 | Kajai | 1534 | 13 | 13 |
| 7 | Bukit kili | 1163 | 10 | 10 |
| Jumlah | | 11.783 | 100 | 100 |

Sumber : diolah dari data primer

Tabel 2
Distribusi Sampel Pada Masing-Masing Wali Kampung atau jorong
di Nagari Gantung Cirri

| No | Wali Kampung | Jumlah populasi | Persentase sampel | Jumlah sampel |
|--------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Kampai | 693 | 22 | 22 |
| 2 | Baringin | 643 | 20 | 20 |
| 3 | Markio | 564 | 18 | 18 |
| 4 | Kapalo Koto | 720 | 23 | 23 |
| 5 | Pinang Sinawa | 579 | 18 | 18 |
| Jumlah | | 3199 | 100 | 100 |

Sumber : diolah dari data primer

5. Khusus untuk aparat nagari diambil dari populasi dari aparat di masing-masing nagari yaitu nagari koto baru dan gantung Cirri. Sampel yang dibutuhkan sekitar 10 orang jadi pengambilan nya dilakukan secara random atau acak.

Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian.

Pengujian validitas dan reabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam sebuah kuesioner, apakah isi dalam butir-butir pertanyaan tersebut valid dan reabel. Untuk mengetahui butir-butir pertanyaan tersebut valid dan reabel dilakukan dengan memasukan data hasil jawaban responden yang ada dalam program SPSS, kemudian dilakukan uji signifikansi dengan uji t yang kemudian diolah dengan rumus

$$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{N-2}}}$$

Ket: r = *Corrected item total correlations*
N = Jumlah sampel

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, reabilitas dapat tercapai. Sementara validitas dari instrumen penelitian telah dapat dicapai oleh 40 butir pertanyaan dalam uji kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit analisis individu di nagari Koto Baru dan Gantung Ciri yang berumur 16 tahun keatas.

Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan¹⁹ Data yang diperoleh adalah data-data empirik dengan demikian maka proses penganalisaan data akan menggunakan analisa data kuantitatif atau analisa statistik. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik dengan teknik korelasi untuk melihat hubungan antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh atau antara variabel X dengan variabel Y

Lokasi Penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan ini berlokasi di nagari koto baru dan gantung Ciri Kecamatan kubung kabupaten solok. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena nagari koto baru termasuk salah satu nagari yang memiliki mata pencarian yang cukup beragam dengan penduduknya yang lebih heterogen. Nagari gantung Cirri dipilih karena nagari gantung Ciri merupakan salah satu nagari pilot proyek GTZ Jerman dengan Kabupaten Solok.

Definisi Operasional

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan beberapa variabel sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Adalah kualitas yang dimiliki oleh orang-orang atau aparat yang akan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang tingkatannya lebih rendah. Jadi berhasil atau tidaknya

¹⁹ Masri Singarimbun...Op.Cit hal 263

aparatus yang menjalankan kewenangan tersebut tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Instrumen pengukuran pertanyaan dan jawaban menggunakan skala Likert. Dari jawaban 1-3 berdasarkan perhitungan skala, maka didapatkan tingkat SDM dari aparat yaitu: Tinggi (2,34 - 3), sedang (1,67- 2,33), rendah (1 - 1,66)

2. Keuangan

Sebagai alat ukur uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga nagari. Keadaan keuangan nagari yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan - kemungkinan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah nagari.

Keuangan disini yang diukur adalah tingkat persentase pembagian dana alokasi umum untuk nagari (Daun) yang didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Solok. Jadi disini nantinya akan diperbandingkan bagaimana hasil persentase pembagian dana daun ketika dihadapkan pada pelaksanaan pelimpahan kewenangan dan pelayanan di pemerintahan nagari. Persentase pembagiannya didasarkan pada besarnya alokasi dana tersebut yang dijadikan sebagai dana rutin, dana bagi hasil, untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan sehingga akhirnya akan memperbesar pendapat asli nagari tersebut.

3. Partisipasi masyarakat, bukan hanya sekedar sarana legitimasi program, tetapi juga merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan tersebut. Yang dilihat disini adalah tingkat partisipasi keterlibatan responden dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan di nagari.

Instrumen pengukuran pertanyaan dan jawaban menggunakan skala Likert. Dan jawaban 1-3 berdasarkan perhitungan skala, maka didapatkan tingkat keterlibatan responden dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terdiri dari : Tingginya tingkat keterlibatan responden (2,34 - 3) sedang tingkat keterlibatan responden (1,67- 2,33), rendahnya tingkat keterlibatan responden (1 - 1,66).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Jenis dan Kategori Kewenangan yang Dilimpahkan

Keberhasilan penyelenggaraan bidang dan urusan yang dilimpahkan untuk diselenggarakan di pemerintahan nagari sebagai daerah otonom jelas terkait dengan jenis wewenang yang diserahkan. Pernyataan ini sesungguhnya merefleksikan bahwa adanya keterbatasan dari pemerintah nagari untuk menyelenggarakan semua wewenang yang telah dilimpahkan tersebut.

Penelitian ini mengacu pada SK Bupati Solok No 16 tahun 2001 tentang pelimpahan wewenang dan urusan dari pemerintah kabupaten ke pemerintahan nagari. Dalam konsideran SK Bupati No 16 tahun 2001 terkandung makna filosofis dan sosiologis dari maksud penyerahan wewenang yakni "*dalam rangka memberdayakan pemerintahan*

*nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat*⁴⁵

1. Penyerahan Wewenang Menyangkut Bidang Urusan

Tabel 3
Jenis, Jumlah Bidang Dan Jumlah Urusan Dan Bentuk Wewenang

| Kabupaten | Jumlah Bidang | Jumlah Urusan | Keterangan |
|-----------|---------------|---------------|--|
| Solok | 19 | 105 | Tidak ada penegasan terhadap wewenang dan asal usul atau wewenang murni nagari |

2. Kategori dan jenis kewenangan yang Diselenggarakan Pemerintahan Nagari.

Analisis kewenangan dan kategori yang Telah dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Koto Baru dan Pemerintahan Nagari Gantung Ciri

Tabel 4
Kategori dan jenis kewenangan yang telah Dilaksanakan di Nagari Koto Baru

| KATEGORI | Pemerintahan Nagari Koto Baru | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| Pengelolaan Penuh | 1 | Bidang kehutanan 1) Penghijauan dan konservasi tanah 2) Perburuan tradisional |
| | 2 | Bidang koperasi 1) Pungutan dana pembangunan dan dana kerja koperasi 2) Pengelolaan UED-SP dalam nagari |
| | 3 | Bidang pariwisata 1) Pengelolaan objek wisata nagari 2) Pengelolaan lokasi perkemahan 3) Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan |
| | 4 | Bidang PU 1) Pemeliharaan rutin jalan nagari 2) IMB yang ada dinagari 3) Irigasi nagari 4) Pengelolaan air bersih nagari 5) Pengelolaan pomponisasi 6) Pemeliharaan irigasi 7) Perawatan irigasi 8) Operasi perawatan jaringan kecil 9) Pengelolaan embung keluarga 10) Pembangunan jalan nagari |

⁴⁵ Laporan Efektifitas Pelimpahan wewenang ...Op.Cit.,hal 39.

| | | |
|----------------|----|--|
| | | 11) Memberikan surat keterangan atas tanah 12) Penetapan batas nagari 13) Penetapan batas tanah ulayat nagari |
| | 5 | Bidang perhubungan 1) Pengelolaan parkir |
| | 6 | Bidang kependudukan 1) Menerbitkan KTP dan kartu keluarga 2) Pengelolaan kelompok bina keluarga 3) Pengelolaan kel. Usaha eko. Produktif |
| | 7 | Bidang tenaga kerja 1). Pendataan dan klasifikasi potensi tenaga kerja |
| | 8 | Bidang kesehatan 1) Penyuluhan sederhana 2) Pelaksanaan posyandu 3) Pengelolaan dana sehat 4) Kegiatan taman obat keluarga |
| | 9 | Bidang pertanian 1) Pengaturan pelaks. Tanggulangi hama 2) Penetapan sasaran area pengembangan lahan 3) Pembangunan saluran untuk budi daya perikanan 4) Pengelolaan pustaka petunjuk pertanian 5) Pengelolaan balai benih ikan di nag 6) Penguatan retribusi rmh potong trnk 7) Penyelengg. Kebun bibit pakan trnk 8) Pengaturan pemanfaatan air untuk usaha tani |
| | 10 | Bidang sosial 1) Pendataan penyandang mslh sosial 2) Mengeluarkan surat keterangan miskin 3) Pengurusan orang terlantar |
| | 11 | Bidang kesbanglinmas 1) Penanggulangan bencana alam di nag 2) Kebijakan untuk kesiapan bencana |
| | 12 | Bidang perencanaan 1) Penelitian dan pendapatan potensi nag 2) Penyusunan rencana pemb. Nagari |
| | 13 | Bidang perkebunan 1. Pelaksanaan penangg. Hama eksplosif. |
| Pemberian Izin | 1 | Bidang pariwisata) Pemberian izin dan pengawasan home stay (pondok wisata) di nagari |
| | 2 | Bidang pertanian) Pemberian izin usaha penangkar benih/bibit pertanian |
| | 3 | Bidang penerangan, informasi dan komunikasi) Pemberian izin tempat pengelolaan peredaran VCD/penyewaan VCD |

| | | |
|--------------------------|----|---|
| Pengawasan dan Pembinaan | 1 | bidang perdagangan) Pengawasan terhadap penggunaan alat uttp) Monitoring harga barang dan jasa di nag |
| | 2 |) Pengawasan terhadap pupuk dan pestisida yang beredar bidang perhubungan) Pengawasan pemakaian jalan di nag) Pengawasan pelihara rambu-rambu jalan dan alat jalan di nag |
| | 3 | bidang kependudukan) Melakukan pendataan dan pembinaan dalam keg. Mutasi penduduk) Pengawasan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi) Pembinaan kader KB |
| | 4 | bidang pendidikan) Memantau dan mengawasi proses belajar dan mengajar dari TK, SD, SLTP, SLTA) Memantau dan mengawasi keg. Siswa |
| | 5 | bidang kesehatan) Pengawasan petugas puskesmas pembantu, bidan desa dan polindes) Pengawasan terhadap praktek dukun bayi) Pembinaan dan pengawasan usaha kesehatan sekolah |
| | 6 | bidang pertanian) Pengawasan terhadap penangkapan ikan dg alat terlarang di perairan umum) Pemantauan dan pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan (ib)) Pengawasan lalu lintas ternak di nag |
| | 7 | bidang sosial) Pembinaan bidang sosial, masyarakat dan organisasi sosial |
| | 8 | bidang kesbanglinmas) Pengawasan pemberian izin penyewaan play station dan sejenisnya |
| | 9 | bidang penerangan/informasi & komunikasi)Pembinaan kelompok komunikasi social)Pengawasan peredaran/pemutaran film keiling)Pengawasan peredaran vcd/film yang lolos sensor |
| | 10 | bidang perkebunan 1)Pengawasan pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan |
| Rekomendasi | 1 | Bidang perdagangan 1) Rekomendasi dalam pemberian izin pendirian gudang dan perdagangan 2) Rekomendasi izin usaha perdagangan |

| | | |
|------------------|---|---|
| | 2 | Bidang koperasi 1) Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi 2) Rekomendasi dan pengawasan dana kredit bumh 3) Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi |
| | 3 | Bidang pertambangan dan lingk. Hidup 1) Rekomendasi izin pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman |
| | 4 | Bidang tenaga kerja 1) Rekomendasi terhadap tenaga kerja yang akan dilatih |
| | 5 | Bidang sosial 1) Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah |
| | 6 | Bidang kasbanglinmas 1) Rekomendasi izin keramaian |
| Tugas Pembantuan | 1 | Bidang kependudukan 1) Pelaksanaan penyuluhan ttg. Kb |
| | 2 | idang kesehatan) Membantu pelaksanaan dan pengawasan pmt penyuluhan dan pmt pemulihan |
| | 3 | idang perencanaan/informasi & komunikasi) Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijakan daerah melalui media pertemuan |
| Fasilitas | 1 | Bidang pendidikan 1) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pendidikan. |
| | 2 | Bidang kesehatan 1) Kewaspadaan dini terhadap terjadinya klb berupa laporan 1 x 24 jam |
| | 3 | Bidang pertanian 1) Penumbuhan & pengembangan kelembaan petani |
| | 4 | Bidang perkebunan 1) Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya |

Tabel 5

Kategori dan jenis kewenangan yang telah Dilaksanakan di Nagari Gantung Ciri

| KATEGORI | Pemerintahan Nagari Gantung Ciri | |
|-------------------|----------------------------------|---|
| Pengelolaan Penuh | 1 | Bidang kehutanan 3) Penghijauan dan konservasi tanah 4) Perburuan tradisional |
| | 2 | Bidang koperasi 1) Pungutan dana pembangunan dan dana kerja koperasi 2) Pengelolaan UED-SP dalam nagari |
| | 3 | Bidang PU |

| | | |
|--------------------------|----|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan rutin jalan nagari 2) IMB yang ada dinagari 3) Irigasi nagari 1) Pengelolaan air bersih nagari 2) Pengelolaan pomponsasi 6) Pemeliharaan irigasi 7) Perawatan irigasi 8) Operasi perawatan jaringan kecil 9) Pengelolaan embung keluarga 10) Pembangunan jalan nagari 11) Memberikan surat keterangan atas tanah 14) Penetapan batas nagari 15) Penetapan batas tanah ulayat nagari |
| | 4 | Bidang perhubungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan parkir |
| | 5 | Bidang kependudukan <ul style="list-style-type: none"> 1) Menerbitkan KTP dan kartu keluarga 2) Pengelolaan kelompok bina keluarga 3) Pengelolaan kel. Usaha eko. Produktif |
| | 6 | Bidang tenaga kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendataan dan klasifikasi potensi tenaga kerja |
| | 7 | Bidang kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyuluhan sederhana 2) Pelaksanaan posyandu 3) Pengelolaan dana sehat 4) Kegiatan taman obat keluarga |
| | 8 | Bidang pertanian <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan pelaks. Tanggulasi hama 2) Penetapan sasaran area pengembangan lahan 3) Pembangunan saluran untuk budi daya perikanan 4) Pengelolaan pustaka petunjuk pertanian 5) Pengelolaan balai benih ikan di nag 6) Pengaturan pemanfaatan air untuk usaha tani |
| | 9 | Bidang sosial <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendataan penyandang mslh sosial 2) Mengeluarkan surat keterangan miskin 3) Pengurusan orang terlantar |
| | 10 | Bidang perencanaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan pendapatan potensi nag 2) Penyusunan rencana pemb. Nagari |
| Pemberian Izin | 1 | Bidang pertanian) Pemberian izin usaha penangkar benih/bibit pertanian |
| Pengawasan dan Pembinaan | 1 | idang perdagangan) Pengawasan terhadap penggunaan alat uttp) Monitoring harga barang dan jasa di nag |

| | | |
|-------------|----|--|
| | 2 | <ul style="list-style-type: none">)Pengawasan terhadap pupuk dan pestisida yang beredar idang perhubungan)Pengawasan pemakaian jalan di nagari)Pengawasan pelihara rambu-rambu jalan dan alat jalan di nagari |
| | 3 | <ul style="list-style-type: none"> idang kependudukan)Melakukan pendataan dan pembinaan dalam keg. Mutasi penduduk)Pengawasan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi)Pembinaan kader KB |
| | 4 | <ul style="list-style-type: none"> idang pendidikan) Memantau dan mengawasi proses belajar dan mengajar dari TK, SD, SLTP, SLTA) Memantau dan mengawasi keg. Siswa |
| | 5 | <ul style="list-style-type: none"> idang kesehatan) Pengawasan petugas puskesmas pembantu, bidan desa dan polindes) Pengawasan terhadap praktek dukun bayi) Pembinaan dan pengawasan usaha kesehatan sekolah |
| | 6 | <ul style="list-style-type: none"> idang pertanian) Pengawasan terhadap penangkapan ikan dg alat terlarang di perairan umum) Pemantauan dan pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan (ib)) Pengawasan lalu lintas ternak di nag |
| | 7 | <ul style="list-style-type: none"> idang sosial) Pembinaan bidang sosial, masyarakat dan organisasi sosial |
| | 8 | <ul style="list-style-type: none"> idang kesbanglinmas) Pengawasan pemberian izin penyewaan play station dan sejenisnya |
| | 9 | <ul style="list-style-type: none"> idang penerangan/informasi & komunikasi) Pembinaan kelompok komunikasi sosial) Pengawasan peredaran/pemutaran film keliling) Pengawasan peredaran vcd/film yang lolos sensor |
| | 10 | <ul style="list-style-type: none"> idang perkebunan) Pengawasan pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan |
| Rekomendasi | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Bidang perdagangan 1) Rekomendasi izin usaha perdagangan |
| | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Bidang koperasi 1) Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi |
| | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Bidang sosial 1) Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah |

| | | |
|------------------|---|---|
| | 4 | Bidang kasbanglinmas 1) Rekomendasi izin keramaian |
| Tugas Pembantuan | 1 | Bidang kependudukan 1) Pelaksanaan penyuluhan tentang KB |
| Fasilitas | 1 | Bidang pendidikan 2) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pendidikan. |
| | 2 | Bidang kesehatan 1) Kewaspadaan dini terhadap terjadinya klb berupa laporan 1 x 24 jam |
| | 3 | Bidang pertanian 1) Penumbuhan & pengembangan kelembagaan petani |
| | 4 | Bidang perkebunan 1) Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya |

Analisis Korelasi Antar Variabel

Analisis ini digunakan untuk melacak atau mengetahui tingkat hubungan simetris antara variabel bebas dengan variabel terikat (*independent variable dengan dependent variable*). Besarnya korelasi antara variabel yang diukur terlihat dari besarnya koefisien korelasi (r). koefisien ini-lah yang akan memberi petunjuk tingkat keeratan hubungan antar variabel dan arah korelasinya sendiri.

Untuk melihat soliditas korelasi dan seberapa besar pengaruh korelasinya digunakan analisis determinasi (r^2). Adapun standar keeratan hubungan yang terjadi di klasifikasikan sebagai berikut:

1. 0,0-0,2 = kategori lemah sekali
2. >0,2-0,4 = kategori lemah
3. >0,4-0,7 = kategori sedang
4. >0,7-0,9 = kuat
5. >0,9-1 = kuat sekali

Berdasarkan analisis korelasi dan matrik korelasi, maka diperoleh korelasi antara variabel sebagai berikut:

1. Korelasi antara SDM (X_1) dengan efektifitas wewenang dan pelayanan pemerintahan kabupaten ke pemerintah nagari (Y) Pemerintahan Nagari Koto Baru

Nilai koefisien korelasi kedua variabel sebesar, $-0,122$ dan $r^2 = 0,015$. kedua variabel ini berarti memiliki korelasi negatif, karena itu, jika tingkat SDM semakin tinggi maka semakin rendahlah efektifitas wewenang dan pelayanan di pemerintahan nagari koto baru dan sebaliknya jika SDM di pemerintahan nagari koto baru rendah maka efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan akan semakin tinggi. Keeratan hubungan kedua variabel ini tergolong kategori lemah sekali. hal ini dapat diartikan Y terhadap variasi nilai X_1 hanya 1,5 %. Lemahnya hubungan kedua variabel ini kemudian diperjelas dengan tingkat signifikannya yaitu: Untuk tingkat signifikannya = 0,737 dan itu > dari 0,05.

artinya antara X₁ atau SDM dan Y atau Efektifitas wewenang dan pelayanan mempunyai hubungan tetapi sangat lemah .

2. Korelasi antara keuangan (X₂) dengan efektifitas wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari (Y) Pemerintahan Nagari Koto Baru

Untuk keuangan karena tidak bisa diukur tingkat skalanya maka disini diambil persentase pembagiannya saja untuk nagari koto baru.

Tabel 6: Sumber Pendapatan Dalam APBN Koto Baru

| Dana DAUN (Rp) | Dana Rutin (Rp) | Bagi Hasil (Rp) | Swadaya Masyarakat (Rp) | PAN (Rp) |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 140.636.000,170. | 67.500000 | 7.079.000 | 51.340.000 | 82.073.000 |

Data Primer

Tabel 7: Distribusi Daun Nagari Koto Baru

| | |
|---------------------|------------------|
| BPN | 2.095.000.425,5 |
| Belanja nagari | 84.380.000.702 |
| Belanja Pembangunan | 35.159.000.042,5 |

Data Primer dan diolah sendiri

Dari tabel dapat dilihat dengan DAUN 140.636.000,170 juta dan PAN nagari sebesar 82.073.000 juta dengan penduduk sekitar 15000-an jiwa sebenarnya tidak sebanding karena DAUN yang diterima oleh nagari ternyata tidak mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan dan pelayanan pada masyarakat tetapi jika dibandingkan dengan intensitas efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan bisa dikatakan cukup tinggi karena kalau diukur tingkat persentasenya sekitar 89 % dari responden menyatakan bahwa pelayanan di pemerintahan nagari sudah baik walaupun dengan keminiman dari segi keuangan untuk nagari. Intinya kalau semakin besar keuangan atau dana yang ada pada nagari maka akan semakin efektif pelayanan dan wewenang tersebut tiba dimasyarakat. Dan sebaliknya jika keuangan atau dana yang ada pada nagari lebih kecil sedangkan kewenangan yang diserahkan kenagari dalam porsi yang cukup besar maka kewenangan dan pelayanan tersebut tidak akan efektif.

3. Korelasi antara Partisipasi Masyarakat (X₃) dengan efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten pada pemerintahan nagari Koto Baru (Y)

Nilai koefisien korelasi kedua variabel sebesar, 0.109 dan $r^2 = 0,012$. Kedua variabel ini berarti memiliki korelasi positif antara kedua variabel, jika tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka semakin semakin tinggi pula efektifitas wewenang dan pelayanan di pemerintahan nagari koto baru dan sebaliknya jika partisipasi masyarakat di nagari koto baru rendah maka efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan akan rendah juga. Tetapi keeratan hubungan kedua variabel ini tergolong kategori lemah sekali, hal ini dapat diartikan Y terhadap variasi nilai X₃ hanya 1,2 % . Lemahnya hubungan kedua variabel ini kemudian diperjelas dengan tingkat signifikannya yaitu : Untuk

tingkat signifikannya = 0,281 dan itu > dari 0,05, artinya antara X_2 atau partisipasi masyarakat dan Y atau Eketifitas wewenang dan pelayanan mempunyai hubungan tetapi sangat lemah.

4. Korelasi antara SDM (X_1) dengan efektifitas wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari (Y) Pemerintahan Nagari Gantung Ciri

Nilai koefisien korelasi kedua variabel sebesar 0,118 dan $r^2 = 0,014$ kedua variabel ini berarti memiliki korelasi positif, jika tingkat SDM semakin tinggi maka semakin tinggi efektifitas wewenang dan pelayanan di pemerintahan nagari gantung ciri dan sebaliknya jika SDM di pemerintahan nagari rendah maka efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan akan rendah juga. Keeratan hubungan kedua variabel ini tergolong kategori lemah sekali. Lemahnya hubungan kedua variabel ini dapat diartikan Y terhadap variasi nilai X_1 sekitar 1,4 %. Kemudian diperjelas dengan tingkat signifikannya yaitu : Untuk tingkat signifikannya = 0,745 dan itu > dari 0,05, artinya antara X_1 atau SDM dan Y atau Eketifitas wewenang dan pelayanan mempunyai hubungan tetapi sangat lemah.

5. Korelasi antara keuangan (X_2) dengan efektifitas wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten ke pemerintah nagari (Y) Pemerintahan Nagari Gantung Ciri

Untuk keuangan karena tidak bisa diukur tingkat skalanya maka disini diambil persentase pembagiannya saja untuk nagari gantung ciri adalah:

Tabel 8 : Sumber Pendapatan Dalam APBN Gantung Ciri

| Dana DAUN (Rp) | Dana Rutin (Rp) | Bagi Hasil (Rp) | Swadaya Masyarakat (Rp) | PAN (Rp) |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 92.080.000,987 | - | 3.031.000 | - | 3.136.000 |

Data Primer

Tabel 9 : Distribusi Daun Nagari Gantung Ciri

| | |
|---------------------|-------------------|
| BPN | 13.812.000,148,05 |
| Belanja nagari | 55.248.000,592 |
| Belanja Pembangunan | 23.020.000,247 |

Data Primer dan diolah sendiri

Dari tabel dapat dilihat dengan DAUN 92.080.000.987 juta dan PAN nagari sebesar 3.136.000 juta dengan penduduk kurang dari 10000-an jiwa sebenarnya cukup sebanding sebanding karena DAUN yang diterima oleh nagari ternyata mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan dan pelayanan pada masyarakat tetapi jika dibandingkan dengan intensitas efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan bisa dikatakan cukup tinggi karena kalau diukur tingkat persentasenya sekitar 66 % dari responden menyatakan bahwa pelayanan di pemerintahan nagari sudah baik walaupun dengan kekurangan aparat di nagari. Intinya kalau semakin besar keuangan atau dana yang ada pada nagari maka akan semakin efektif pelayanan dan wewenang tersebut tiba dimasyarakat. Dan

sebaliknya jika keuangan atau dana yang ada pada nagari lebih kecil sedangkan kewenangan yang diserahkan kenagari dalam porsi yang cukup besar maka kewenangan dan pelayanan tersebut tidak akan efektif.

6. Korelasi antara Partisipasi Masyarakat (X_3) dengan efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pemerintah kabupaten pada pemerintahan Gantung Ciri (Y)

Nilai koefisien korelasi kedua variabel sebesar, 0,031 dan $r^2 = 0,096$. kedua variabel ini berarti memiliki korelasi positif antara kedua variabel, jika tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka semakin semakin tinggi pula efektifitas wewenang dan pelayanan di pemerintahan nagari gantung ciri dan sebaliknya jika partisipasi masyarakat di nagari gantung ciri rendah maka efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan akan rendah juga. Tetapi keeratan hubungan kedua variabel ini tergolong kategori lemah sekali. Lemahnya hubungan kedua variabel ini diperjelas dengan tingkat signifikannya yaitu : Untuk tingkat signifikannya = 0,756 dan itu > dari 0,05, artinya antara X_3 atau partisipasi masyarakat dan Y atau Eketifitas wewenang dan pelayanan mempunyai hubungan tetapi sangat lemah .

Analisa Regresi

Digunakan terutama untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat (*dependent variable*). Dalam analisa regresi terdapat minimal satu persamaan regresi (*estimating equation*) yang merupakan suatu formula matematika guna mencari nilai dari variabel dependen dan variabel independen yang diketahui. Disini regresi yang digunakan adalah regresi berganda (*Multiple regression*) karena terdapat lebih dari satu variabel bebas atau independen variabel.

1. Nagari Koto Baru

- Model Summary

Angka R^2 adalah 0.684 hal ini berarti variabel efektifitas wewenang dan pelayanan publik dapat diperjelas oleh variabel SDM dan partisipasi masyarakat sebesar 68,4 % sedangkan sisanya sebesar 31,6 % dijelaskan oleh variabel variabel lainnya misalnya organisasi, peralatan dll.

- Coefficients

Y atau efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan adalah = 38,323 + 1,220 SDM +(- 0,819) partisipasi masyarakat. Walaupun demikian yang diperhatikan disini adalah dari uji t terlihat bahwa nilai t hitung ataupun uji f memperlihatkan memperlihatkan bahwa konstanta tidak signifikan sehingga pada dasarnya model yang dibuat tidak memadai untuk memprediksikan efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan

2. Nagari Gantung Ciri

- Model Summary

Angka R^2 adalah 0,249 hal ini berarti variabel efektifitas wewenang dan pelayanan publik dapat diperjelas oleh variabel SDM dan partisipasi masyarakat sebesar



24,9 % sedangkan sisanya sebesar 75,1 % dijelaskan oleh variabel variabel lainnya misalnya organisasi, peralatan dll

- Coefficients

Y atau efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan adalah $= 50,877 + (- 8,772 E-03 \text{ SDM} + (- 0,616 \text{ I partisipasi masyarakat}$

Walaupun demikian yang diperhatikan disini adalah dari uji t terlihat bahwa nilai t hitung ataupun uji f memperlihatkan memperlihatkan bahwa konstanta tidak signifikan sehingga pada dasarnya model yang dibuat tidak memadai untuk memprediksikan efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan.

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Nagari Koto Baru memiliki SDM aparat yang tinggi yaitu mencapai 10 % yaitu semua aparat di nagari koto baru memiliki tingkat SDM yang tinggi, dan SDM yang tinggi ini ternyata tidak berpengaruh pada efektifitas pelimpahan wewenang pelayanan yang diberikan pada masyarakat tetap saja tidak ada peningkatan sama sekali artinya ada korelasi terbalik antara SDM aparat nagari koto baru dengan efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan sehingga hipotesa yang menyatakan bahwa semakin tinggi SDM akan semakin tinggi pula efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pada masyarakat tidak terbukti di pemerintahan Nagari Koto Baru. Berbeda di Nagari Gantung Ciri dimana SDM aparat nagari yang dikatan juga cukup tinggi ternyata berpengaruh pada efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan di pemerintahan nagari jadi hipotesa yang menyatakan semakin tinggi SDM akan semakin efektif pelimpahan wewenang dan pelayanan ternyata terbukti di nagari gantung ciri.

Jika dilihat dari segi keuangan untuk Nagari Koto Baru, dengan DAUN yang lebih besar jika dibandingkan dengan DAUN di Nagari gantung ciri ternyata tidak juga efektif untuk menjalankan pelimpahan wewenang dan pelayanan pada masyarakat karena besarnya penduduk nagari yang melebihi penduduk di nagari lain yang menyebabkan kewenangan tersebut tidak efektif. Karena besarnya pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan nagari untuk membiayai pembangunannya. Tetapi di nagari gantung ciri ternyata dengan DAUN yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan nagari koto baru ternyata membuat kewenangan dan pelayanan tersebut menjadi efektif tetapi kendalanya disini pemerintah nagari gantung ciri tidak begitu transparansi kepada masyarakat nagari tentang pertanggung jawabab keuangannya. Jadi hipotesa yang menyatakan bahwa semakin tinggi keuangan maka akan semakin efektif pelimpahan wewenang dan pelayanan tersebut pada masyarakat.

Jika dilihat dari segi partisipasi masyarakat untuk nagari Koto Baru. Partisipasi masyarakat ternyata sangat berpengaruh pada efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pada masyarakat dan persentase mencapai 70 % dan itu bisa dikatakan cukup tinggi. Untuk Nagari Gantung Ciri ternyata partisipasi masyarakat ternyata juga cukup berpengaruh pada efektifitas pelimpahan wewenang dan pelayanan pada masyarakat. Jadi hipotesa yang menyatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin efektif pelimpahan wewenang dan pelayanan tersebut pada masyarakat terbukti di kedua nagari tersebut.

Daftar Pustaka

Buku- Buku Rujukan

Riwu Kaho Josef. *Prospek Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Melly G.Tan. 1994 " Penggunaan Data Kuantitatif " *Metode Penelitian Masyarakat*, Ed . Koentjaraningrat

Masri Singarimbun. 1989, *Metode Penelitian Surva.*, Jakarta : LP3E5

Sugiaro dkk. 2000 *Teknik Sampling.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,

Jurnal dan artikel

"Otonomi daerah di Masa Depan " Jakarta : *Media Indonesia* ,10 September 2001

Forum Inovasi Capacity Building dan Good Governance. Vol 3 Juni-Agustus. Jakarta : PPs PSIA FISIP UI, 2002

UU dan Peraturan lainnya

TAP MPR No IV / MPR/ 2000 (Jakarta: Pabelan 2000)

Laporan penelitian

Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat. *Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan otonomi Daerah di Sumatera Barat.* Padang : Balitbang dan SCDev UNAND, 2002

Laporan Efektifitas Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Nagari di SumateraBarat. Padang : PS OTODA dan Balitbangda Propinsi Sumatera Barat 2003.